

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebesar 2,05% (y-on-y) pada triwulan III atau lebih rendah dibandingkan inflasi yang terjadi pada triwulan II sebesar 2,32% (y-on-y) dan masih berada dibawah rentang sasaran inflasi nasional, yakni $2,5 \pm 1\%$, namun inflasi Sulawesi Barat pada Triwulan III berada diatas angka inflasi Nasional sebesar 1,84%. Inflasi Sulawesi Barat pada Triwulan III ini lebih rendah dibandingkan pada Trwiulan II dikarenakan pada bulan Juli sampai dengan September stok beras masih mencukupi bahkan mengalami surplus untuk wilayah Polewali Mandar dan Mamuju sehingga harga beras masih terkendali, namun menjadi penyebab inflasi pada periode ini masih dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas perikanan yang mengalami peningkatan akibat fenomena La Nina sehingga mengurangi pasokan ikan. Pada Triwulan III ini Inflasi di Sulawesi Barat secara Year on Year (y-on-y) mengalami fluktuasi dengan angka yang tercatat pada Bulan Juli 2,08%, dan mengalami penurunan pada Bulan agustus dengan angka 1,59% dan meningkatkan lagi pada bulan September ini dengan angka inflasi sebesar 2,05% kenaikan inflasi ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran seperti Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya, serta Kelompok Pendidikan. sedangkan secara month to month (m-to-m) pada Triwulan III inflasi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan tercatat pada Bulan Juli mengalami deflasi sebesar -0,45%, dan Agustus juga mengalami deflasi sebesar -0,13% sedangkan pada Bulan September Sulawesi Barat kembali mengalami inflasi dengan angka sebesar 2.05% secara m-to-m inflasi di Bulan September lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 0,25% sedangkan kelompok pengeluaran lainnya tidak memberikan andil/sumbangan bagi inflasi m-to-m provinsi

Pada Triwulan III Tahun 2024, Inflasi Sulawesi Barat lebih banyak dipengaruhi oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, jika dilihat dari grafik diatas maka dari bulan Juli sampai dengan September 2024 kelompok makanan, minuman dan tembakau selalu mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada dua bulan terakhir yakni pada Juli dan Agustus kelompok ini memberi sumbangan deflasi namun pada bulan September ini kelompok ini menjadi kelompok dengan sumbangan inflasi terbesar. pada Bulan September Inflasi untuk kelompok ini mengalami peningkatan yang tajam dengan inflasi sebesar 0,69% (m-to-m) dengan andil sebesar 0,25% sedangkan di bulan Juli dan Agustus mengalami deflasi dengan angka masing-masing sebesar -1.38% (m-to-m) dengan andil -0,54% dan Agustus -0,59% (m-to-m) dengan andil sebesar -0,22%. Deflasi yang terjadi pada bulan Juli dipengaruhi oleh penurunan harga pada komoditas perikanan seperti Ikan Cakalang, Cabai Merah dan Bawang Merah sedangkan pada Bulan Agustus deflasi dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas beras, bawang merah dan tomat dan Inflasi yang terjadi pada bulan September lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas perikanan seperti Ikan Cakalang dan Ikan Layang dan kedua komoditas tersebut memiliki bobot tertinggi sebagai komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Sulawesi Barat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Tim Pengendali Inflasi Daerah melakukan pemetaan dan identifikasi permasalahan yang

ditempuh dalam pengendalian inflasi pada periode triwulan III (Juli sampai dengan september). adapun permasalahan tersebut didasarkan pada 4 strategi pengendalian inflasi adalah sebagai berikut :

1. Keterjangkauan Harga

- Tingginya permintaan jelang Hari Besar Keagamaan yakni Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW menyebabkan penyedia jasa atau pedagang menaikkan harga apalagi ditunjang dengan kesediaan konsumen membayar lebih tinggi untuk mendapatkan produk yang mereka butuhkan.
- Gerakan Pangan Murah yang dilakukan secara intensif belum dapat secara signifikan mempengaruhi harga di pasar hal ini disebabkan komoditas yang dijual pada kegiatan GPM hanya berupa produk pertanian sementara inflasi di Sulawesi Barat juga banyak dipengaruhi oleh Komoditas Perikanan seperti Ikan Cakalang, Ikan Layang dan Ikan Bandeng selain itu GPM juga perlu merambah pada Wilayah-wilayah lain yang ada di Sulawesi Barat tidak hanya terfokus untuk wilayah Mamuju Saja.

2. Ketersediaan Pasokan

Pada Triwulan III ini kenaikan harga di pasar lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas perikanan hal ini disebabkan oleh Fenomena La Nina sehingga hasil tangkapan nelayan semakin berkurang. Fenomena La Nina yang selalu dikaitkan dengan curah hujan yang meningkatkan sehingga menyebabkan suhu permukaan menjadi lebih rendah sehingga menyebabkan perubahan pola distribusi ikan, beberapa spesies ikan seperti Ikan Cakalang dan Layang bergerak ke daerah yang lebih hangat dan menjauhi area tangkapan nelayan tradisional

3. Kelancaran Distribusi

- Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki infrastruktur yang memadai seperti infrastruktur jalan sebagai contoh masih banyaknya jalan-jalan yang rusak serta masih berjalannya proses perbaikan infrastruktur jalan, hal ini mempengaruhi proses distribusi barang ke berbagai daerah di Sulawesi Barat.
- Untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan di Sulawesi Barat karena wilayah Sulawesi Barat masih termasuk wilayah yang masih bergantung dengan wilayah lain maka kerjasama antar daerah sangat perlu untuk dilakukan

4. Komunikasi Efektif

Masih kurangnya pemahaman konsumen akan informasi harga utamanya Harga HET atau HAP suatu barang sehingga konsumen memilih untuk langsung membeli barang meskipun dengan harga yang mahal tanpa melalui proses negoisasi dan memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sejumlah upaya dilakukan oleh TPID Provinsi maupun Kabupaten di wilayah Sulawesi Barat untuk menjaga stabilitas harga sejumlah bahan pokok selama triwulan III 2024. Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan

Kabupaten, serta *stakeholders* terkait terus bersinergi dan berkoordinasi dalam upaya pengendalian inflasi, upaya yang dilaksanakan berdasarkan 4 strategi pengendalian inflasi antara lain

1. Keterjangkauan Harga

Dalam menjaga keterjangkauan harga sepanjang periode triwulan III 2024 di Sulawesi Barat TPID melakukan berbagai upaya diantaranya : Pemantauan Harga Pangan Harian oleh Disperindagkop, Sidak Pasar dan Distributor di pasar-pasar tradisional, Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayah Mamuju dan Majene sebanyak 41 Kali

2. Ketersediaan Pasokan

Dalam menjaga ketersediaan pasokan di Provinsi Sulawesi Barat sepanjang periode triwulan III 2024 di Sulawesi Barat TPID melakukan upaya dalam rangka peningkatan produksi pertanian guna pemenuhan kebutuhan pangan di Sulawesi Barat utamanya komoditas penyumbang inflasi seperti Beras, Ikan, cabai rawit dan Bawang Merah adapun upaya yang telah dilakukan antara lain : Penyaluran Bibit Cabai dan Bawang Merah, pemberian pupuk seperti Fungisida, Herbisida, Insektisida, Pestisida, Pupuk NPK, Pupuk Organik Cair guna pengawasan mutu tanaman pangan dan hortikultura, Pembinaan kepada kelompok tani komoditi padi guna peningkatan produktifitas padi di Sulawesi Barat, pemberian Bantuan Mesin Katinting K3 8 Unit di Kabupaten Pasangkayu, Mesin Katinting K3 (13PK) 4 Unit di Kabupaten Mamuju, 21 Unit di Kabupaten Polewali Mandar dan 4 Unit di Kabupaten Majene, Mesin Katinting K3 (6,5PK) 26 Unit di Kabupaten Mamuju dan 2 Unit Kabupaten Majene, Mesin Katinting K3 (9PK) 4 Unit di Kabupaten Mamuju dan 4 Unit di Kabupaten Pasangkayu dan Bantuan Kapal 15 GT 1 unit di Kabupaten Pasangkayu, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk Daerah Irigasi Bantalaka di Kab. Pasangkayu.

3. Kelancaran Distribusi

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi di Sulawesi Barat sepanjang periode triwulan III 2024, TPID Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan upaya :Perbaikan Infrastruktur Jalan guna memperlancar distribusi pangan ke berbagai wilayah di Sulawesi Barat seperti Ruas Salutambung Ure kang Kab. Majene, Ruas Batas Tapalang Barat - Desa Tampalang Kab. Mamuju, Ruas Akses Pelabuhan Ako Kab. Pasangkayu, Ruas Tobadak II - Gerbang Tobadak Kab. Mamuju Tengah, memfasilitasi penantangan MOU dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya pengendalian inflasi utamanya dalam penyediaan pasokan pangan di Sulawesi Barat, penandatanganan tersebut dilakukan di Provinsi Gorontalo pada Acara Rapat Koordinasi Wilayah TPID Wilayah Sulampua tanggal 26 September 2024.

4. Komunikasi Efektif

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan mengevaluasi kinerja TPID baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten, dilaksanakan Rapat-rapat bersama dengan seluruh TPID baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Teknis TPID dan Advokasi BPS kepada TPID

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

adapun evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Keterjangkauan Harga

Pemantauan harga harian menunjukkan upaya yang berkelanjutan untuk memantau harga pangan di pasar. Sidak pasar juga memberikan gambaran langsung mengenai kondisi harga di pasar-pasar tradisional

Pelaksanaan **Gerakan Pangan Murah** sebanyak 41 kali sangat baik untuk memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Frekuensi yang tinggi menunjukkan upaya yang sangat proaktif dalam mengatasi inflasi pangan

Tantangannya adalah Walaupun jumlah kegiatan Gerakan Pangan Murah cukup tinggi, perlu diperhatikan bahwa tidak semua komoditas yang menjadi penyumbang inflasi utama seperti beras, cabai, dan bawang dapat tercakup secara optimal dalam gerakan tersebut. Gerakan ini perlu disesuaikan dengan komoditas yang lebih berfluktuasi harganya

2. Ketersediaan Pasokan

Penyaluran bibit cabai dan bawang merah serta pemberian pupuk yang disertai pengawasan terhadap mutu tanaman merupakan langkah penting untuk meningkatkan produksi komoditas yang berpotensi mengalami fluktuasi harga, seperti cabai dan bawang merah

Bantuan mesin katinting dan kapal menunjukkan perhatian terhadap sektor perikanan, yang merupakan salah satu penyumbang inflasi di daerah pesisir. Rehabilitasi jaringan irigasi juga merupakan langkah positif dalam meningkatkan ketersediaan hasil pertanian, khususnya untuk komoditas padi.

Tantangannya adalah Keberhasilan dari bantuan bibit dan pupuk serta mesin katinting memerlukan waktu untuk memberikan dampak yang maksimal. Perlu ada pemantauan lebih lanjut mengenai efektivitas bantuan ini di lapangan, serta memastikan distribusinya tepat sasaran dan digunakan dengan baik oleh petani dan nelayan

3. Kelancaran Distribusi

Perbaikan infrastruktur jalan adalah upaya penting untuk mengurangi biaya distribusi dan memperlancar aliran pangan ke berbagai daerah, terutama ke wilayah terpencil. Memperbaiki akses ke pelabuhan dan jalan-jalan utama akan sangat membantu kelancaran distribusi barang, termasuk pangan.

Penandatanganan MoU dengan provinsi lain untuk pengendalian inflasi menunjukkan langkah kolaboratif yang baik untuk memperkuat pasokan pangan dan mengatasi tantangan distribusi lintas daerah

Tantangannya adalah Meskipun perbaikan infrastruktur jalan sangat bermanfaat, efektivitasnya perlu dievaluasi secara berkelanjutan. Infrastruktur yang telah dibangun harus dipastikan kualitasnya agar dapat digunakan dalam jangka panjang dan benar-benar mengurangi biaya distribusi. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi MoU harus dijalankan dengan baik agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak

4. Komunikasi Efektif

danya rapat koordinasi dan teknis yang rutin antara TPID Provinsi dan Kabupaten memperkuat aliran informasi dan kolaborasi dalam menghadapi masalah inflasi secara bersama-sama. Dengan evaluasi kinerja yang dilakukan, diharapkan kebijakan yang ada bisa lebih efektif dalam menghadapi permasalahan inflasi di daerah masing-masing

Advokasi BPS kepada TPID juga sangat penting untuk memastikan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan

Tantangannya adalah Meski sudah ada komunikasi antar TPID, penting untuk memastikan bahwa informasi yang dibagikan tidak hanya terbatas pada lingkup internal, tetapi juga melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan sektor swasta. Ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan memungkinkan adanya masukan yang lebih bervariasi

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam menghadapi inflasi pada Triwulan III, TPID Provinsi Sulawesi Barat telah merilis usulan atau rekomendasi kebijakan dalam rangka mengendalikan inflasi serta mengontrol ketersediaan pangan. Adapun rekomendasi tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder
2. Optimalisasi pemanfaatan anggaran dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20% dari pagu dana desa untuk pengendalian inflasi pangan.
3. Pemanfaatan teknologi digital dalam intensifikasi komoditas pertanian untuk meningkatkan kualitas dan jumlah hasil panen, serta pada sektor perikanan tangkap untuk meningkatkan efektifitas penangkapan ikan.
4. Penguatan Proses Bisnis dalam pemenuhan Kerjasama Antar Daerah (KAD) agar dapat memenuhi kebutuhan komoditas yang belum dapat terpenuhi di Sulawesi Barat
5. Intensifikasi komoditas alternatif sebagai upaya pemenuhan komoditas dengan pasokan yang masih terbatas, antara lain mendorong praktik perikanan budidaya sebagai alternative produk perikanan tangkap yang rentan terhadap musim
6. Mengoptimalkan pengawasan terhadap jalur distribusi pangan dan percepatan penyelesaian pembangunan jalur distribusi
7. Memperkuat koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder pemangku pengendalian inflasi utamanya dalam pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi di Sulawesi Barat